

“Menimbang Masa Depan Koperasi Desa Merah Putih: Pemerataan Ekonomi, Kemandirian Desa, dan Desain Kebijakan”.

Lishia Erza
Komite Pengembangan Kewirausahaan & Ekonomi Inklusif
Bidang UKM/IKM
DPN APINDO

IG @apindoumkm @kefirlime

APINDO dalam “Indonesia Incorporated”

Mentranslasikan Program Strategis Pemerintah Menjadi Actionable Roadmap

Indonesia Incorporated = (State Direction × Business Execution) + Capital Orchestration + Ecosystem Discipline

The 4-Engine Model

Pemerintah
“*Direction Engine*”
Perumus kebijakan & strategi

Dunia Usaha
“*Execution Engine*”
Penggerak & motor pertumbuhan

Pembiayaan
“*Capital Engine*”
Sektor keuangan sebagai pengungkit pertumbuhan

Penguat Keberlanjutan
“*Ecosystem Engine*”
Kelembagaan, SDM, kepercayaan (*trust*)

FASE 1 – ALIGNMENT (Short term)

- Sinkronisasi prioritas nasional dan kesiapan dunia usaha
- Identifikasi proyek cepat (*quick wins*)

FASE 2 – EXECUTION (Medium term)

- Implementasi proyek skala ekonomi
- Penguatan rantai pasok domestik

FASE 3 – SCALING (Long term)

- Integrasi ke pasar global (FTA/CEPA)
- Transformasi Indonesia sebagai market/production hub

Implementasi Peran Dunia Usaha dalam berbagai Program Strategis Pemerintah



Hilirisasi

Investasi hilirisasi tumbuh 562,1% (2019–2024). Pada 2025 (Q1–Q3) mencapai Rp431,4 triliun, 30,1% dari total investasi (+58,1% YoY).

Peran Dunia Usaha

- Investasi di industri pengolahan (*smelter*, manufaktur, agroindustri)
- Kemitraan dengan Pemerintah untuk pengembangan rantai pasok hilir



Kawasan Industri / Kawasan Ekonomi

Terdapat 173 kawasan industri, 44 di antaranya PSN; Sebarannya: 14 di Sumatera, 11 di Jawa, 8 di Kalimantan, dan 11 di Sulawesi, Papua, serta Maluku.

Peran Dunia Usaha:

- Investasi sebagai *anchor* industri di kawasan baru
- Kolaborasi pengelolaan kawasan (*developer*, *operator*, investor logistik)



Perumahan

Pemerintah mengalokasikan Rp18,8 t untuk FLPP 2025, dengan target 350 ribu unit. Hingga akhir September 2025, realisasi mencapai 182.657 unit / 52,12%.

Peran Dunia Usaha:

- Keterlibatan BUMN, pengembang swasta, dan sektor keuangan dalam pembiayaan rumah rakyat
- Investasi model pembiayaan dan bahan bangunan murah



Koperasi Merah Putih

83.613 telah terbentuk, 108 sudah operasional. Ditargetkan 80.000 beroperasi penuh pada Maret 2026.

Peran Dunia Usaha:

- Kemitraan dengan koperasi sebagai *local partner* dalam rantai distribusi, logistik, dan produksi
- CSR dan program pemberdayaan ekonomi desa



Makan Bergizi Gratis

17.555 SPPG aktif dari target 32 ribu, menciptakan 740 ribu lapangan kerja. Realisasi anggaran Rp41,3 triliun (58%) menjangkau 41,65 juta penerima.

Peran Dunia Usaha:

- Penyediaan bahan pangan, distribusi logistik, kemitraan dengan UMKM lokal
- Potensi pasar baru bagi industri pangan dan agribisnis



Ketahanan Pangan & Energi

Peringkat 63 dunia dalam ketahanan pangan (skor 50,9, terendah di ASEAN), net importer migas sejak 2003, dan konsumsi listrik per kapita rendah.

Peran Dunia Usaha:

- Investasi di sektor energi terbarukan, migas, dan pertanian digital
- Pengembangan kemitraan inklusif dengan petani dari hulu-hilir

Tiga Kendaraan, Tiga Logika: PT × BUMDes × KDMP

Semua sah dan saling melengkapi asalkan standar diterapkan ketika ada uang publik



	PT (UKM)	BUMDes	KDMP
Acuan hukum	UU 40/2007 jo. UU Cipta Kerja, kodifikasi penuh	UU Desa + PP 11/2021	UU 25/1992 + Inpres 9/2025 + PMK/Permen
Model operasi	modal saham → profit; PT Perorangan utk UMK	aset desa → layanan & PADes	keanggotaan → SHU + mandat program negara
Tenaga kerja & upah	UMP/UMK + BPJS wajib, penegakan ketat	honor pelaksana via APBDes/Musdes	norma sama (UU Ketenagakerjaan) — kapasitas bayar belum teruji
Kepatuhan	laporan wajib + audit KAP (kriteria) + pajak penuh	LPJ ke Musyawarah Desa	tanpa mandat audit eksternal universal
Potensi tumbuh	skalabel: ekuitas, tanpa batas wilayah	terikat aset & wilayah desa	terikat keanggotaan; skalabel via federasi/sekunder
Kontribusi PDB	UMKM = 61,9% PDB (2025)	PADes — mikro-lokal	belum ada baseline terukur → alasan dashboard KPI outcome

Asimetri terbalik: dukungan negara terbesar → standar tertipis.
Koreksinya bukan menghukum KDMP tapi menyetarakan standar begitu uang publik masuk.

Menimbang Masa Depan KDMP: Lensa Dunia Usaha

Posisi APINDO: konstruktif, KDMP sebagai calon mitra rantai pasok, dengan syarat desain yang tepat



PEMERINTAH

Direction

bergerak cepat

DUNIA USAHA

Execution

belum terhubung

PEMBIAYAAN

Capital

disiplin pasar?

EKOSISTEM

Trust

titik rawan

±83.000

badan hukum

15.845

gerai rampung 100%

40.000

target operasi 2026

2 minggu

pelatihan 30.000 manajer

Skema pembiayaan bergeser:

PMK 49/2025 (pinjaman koperasi) → PMK 7/2026 & 15/2026: angsuran dibayar via transfer APBN ±Rp40 T/tahun × 6 tahun • plafon Rp3 M/unit gerai • dibangun PT Agrinas • aset milik pemdes/pemda

Badan hukum bisa dicetak dalam setahun, model bisnis yang viable tidak bisa.

Q1 | Peluang & Tantangan bagi Ekonomi Desa

PELUANG

1

AGREGASI

65 jt UMKM → satu titik kontrak, QC & logistik

2

LAST-MILE

±35.000 titik gerai+gudang, jaringan terbesar

3

FORMALISASI

pintu ke pembiayaan & rantai pasok formal

VS

TANTANGAN

1

KECEPATAN vs KAPASITAS

83.000 badan hukum / 15 bln;
manajer dilatih 2 minggu

2

MODEL BISNIS BELUM TERUJI

usaha margin tipis, padat modal kerja

3

UTILISASI ASET

gerai berdiri ≠ gerai berputar
aset idle = beban

Ekosistem Sehat atau Distorsi Pasar?

1 | SIAPA MENANGGUNG RISIKO?

PMK 49/2025
koperasi bayar



PMK 7 & 15
APBN bayar

Rp34,57 T

58% Dana Desa 2026 (PMK 7/2026)

Risiko usaha pindah ke fiskal →
disiplin pasar melemah

2 | PRIVILEGE DISTRIBUSI

Bansos, pupuk, LPG, MBG
= captive market

kickstart ✓

permanen ✗

Sunset clause:
evaluasi kinerja 2–3 tahun

3 | THD SIAPA DISTORSINYA?

bukan thd korporasi
tapi thd warung & UMKM desa

✓ ISI missing market: agregasi, cold storage,
logistik

✗ REPLIKASI existing: warung lawan warung

demarkasi fungsi via Musdes

BGN sendiri memperingatkan praktik “koperasi jadi-jadian” yang memonopoli pasokan SPPG,
artinya risiko distorsi ini juga diakui pemerintah.

*“Dukungan negara sebaiknya membeli waktu untuk pengusaha Indonesia terutama UMKM untuk menjadi kompetitif,
bukan membeli ketidakhadiran kompetisi.”*

Belajar dari Sejarah: KUD → KDMP

1978

KUD lahir (Inpres 2/1978)
mandat pupuk & Bulog

MANDAT PENYALURAN

KUD: pupuk/Bulog → kolaps saat dicabut

KDMP: bansos, subsidi, MBG

Saran Koreksi:

sunset + target pendapatan mandiri

1998

privilege dicabut
mayoritas kolaps

PENGURUS DITUNJUK

KUD: dikendalikan birokrasi

KDMP: Kades ex-officio, top-down

Saran Koreksi:

dipilih & akuntabel ke anggota

2025

KDMP lahir (Inpres 9/2025)
80.000 unit

TANPA DISIPLIN EXIT

KUD: dukungan universal permanen

KDMP: dukungan seragam 80.000 unit

Saran Koreksi:

graduation framework

*KUD gagal bukan karena bentuk koperasinya
tapi karena pilihan desain yang semuanya masih bisa dikoreksi hari ini.*

Aritmetika Fiskal 2026: Rp1 Fiskal Bekerja di Mana?

Memaksimalkan dampak per rupiah fiskal yang terbatas

KUR — instrumen eksisting

×8

Rp36,5 T
subsidi bunga



Rp290 T penyaluran

±4 juta debitur/tahun • NPL 2,18% • 1,17 juta graduasi • 15+ tahun rekam jejak

Setiap Rp1 fiskal menggerakkan ±Rp8 kredit karena bank yang menaruh modal dan menanggung risiko. Itu pula sebabnya bank menyaring debitur (NPL 2,18%).

Rp1 fiskal membeli keterjangkauan; pasar menyediakan uang dan disiplinnya.

Skema KDMP — instrumen baru

×1

Rp83 T Himbara + Rp34,57 T Dana Desa
(RAPBN 2026 • PMK 7/2026)



±Rp240 T plafon

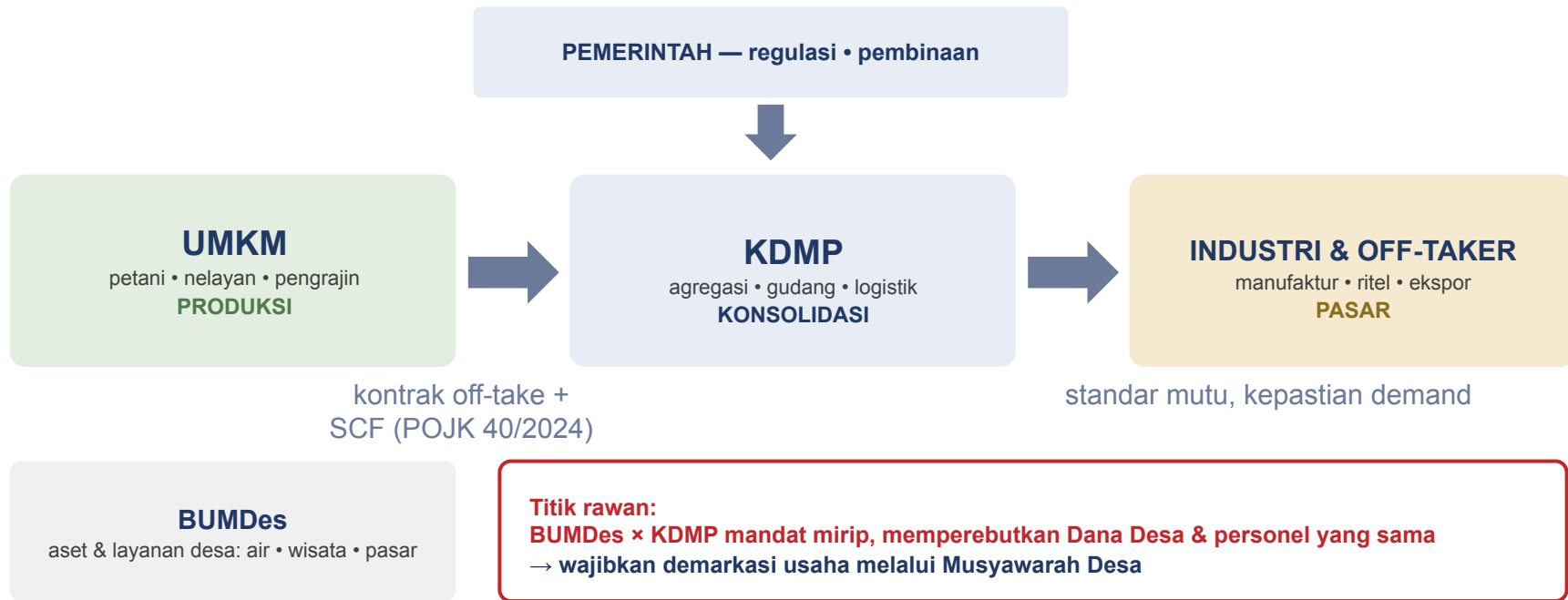
80.000 entitas tanpa rekam jejak, angsuran via APBN ±Rp40 T/thn × 6 thn (Menkeu), jangkauan anggota belum terukur

Di KUR, negara membayar bunganya dan pihak bank menyediakan dana pinjamannya.

Di skema KDMP, negara membayar pinjamannya sendiri

Beda manfaat antara leverage ×8 dan ×1 dari setiap rupiah keluar

Pembagian Peran: Fungsi Rantai Nilai, Bukan Wilayah



*KDMP kuat sebagai Tier-3 aggregator yang menghubungkan usaha rakyat dengan industri.
Semua pelaku di rantai ini adalah pihak swasta (rakyat, bukan pemerintah);
pembedanya fungsi, bukan ukuran.*

Ukur Outcome & Dampak, Bukan Jumlah Koperasi Terbentuk

LAPIS 4 — FISKAL & TATA KELOLA

cost per outcome, % teraudit, % lulus dari dukungan fiskal

LAPIS 3 — KESEHATAN EKOSISTEM

warung lokal tumbuh atau tergusur? kontrak industri (nilai, bukan MoU)

LAPIS 2 — DAMPAK ANGGOTA & DESA

harga di tingkat petani naik, pendapatan riil, lapangan kerja tetap

LAPIS 1 — VIABILITAS USAHA

arus kas positif 12/24 bln, rasio pendapatan mandiri, NPL, utilisasi gerai

*Metrik aktivitas tidak lolos review co-financing lebih luas.
Outcome & impact adalah syarat kredibilitas.*

Rekomendasi APINDO: Dari Pembentukan ke Keberlanjutan



***83.000 akta adalah pencapaian administratif luar biasa.
Keberhasilan baru bisa bangga diklaim ketika petani menerima harga lebih baik,
warung sebelah ikut tumbuh, dan bukunya bisa diaudit.
Dunia usaha siap menjadi mitra untuk sampai ke sana.***

“Menimbang Masa Depan Koperasi Desa Merah Putih: Pemerataan Ekonomi, Kemandirian Desa, dan Desain Kebijakan”.

Lishia Erza
Komite Pengembangan Kewirausahaan & Ekonomi Inklusif
Bidang UKM/IKM
DPN APINDO

IG @apindoumkm @kefirlime